

BAB I PENDAHULUAN

I.1 LATAR BELAKANG

Renja Perangkat Daerah adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 1 (satu) tahun memuat program, kegiatan sub kegiatan, lokasi dan kelompok sasaran yang disertai indikator kinerja dan pendanaan sesuai dengan tugas dan fungsi setiap Perangkat Daerah yang disusun berpedoman kepada Renstra Perangkat Daerah dan RKPD. Renja Perangkat Daerah memuat hasil evaluasi Renja tahun lalu, dan memuat tujuan dan sasaran Renja serta memuat program dan kegiatan untuk satu tahun kedepan dengan mengacu pada Renstra Perangkat Daerah.

Renja Badan Keuangan Daerah Kota Singkawang tahun 2024 merupakan dokumen rencana dengan wawasan satu tahun ke depan yang disusun dengan berpedoman pada Rencana Strategis (Renstra) Badan Keuangan Daerah Kota Singkawang tahun 2023-2026. Penyusunan Renja Perangkat Daerah harus memperhatikan seluruh perubahan sosial, politik dan ekonomi serta menjadikan hasil evaluasi perencanaan tahun sebelumnya sebagai referensi.

Badan Keuangan Daerah dalam mendukung penyelenggaraan program pembangunan tahunan pemerintah daerah, sehingga di dalam rencana kerja yang berisikan program dan kegiatan yang disusun lebih menekankan kepada Pengelolaan keuangan dan Pendapatan daerah sebagai wujud dari kinerja Perangkat daerah pada tahun 2024.

Penyusunan Renja Badan Keuangan Daerah Kota Singkawang dilaksanakan melalui serangkaian kegiatan yang diawali dengan pelaksanaan evaluasi Renja tahun lalu, meliputi evaluasi pencapaian Target Program kegiatan, analisis kinerja pelayanan Perangkat Daerah, review rancangan awal Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD).

I.2 LANDASAN HUKUM

Penyusunan Renja Badan Keuangan Daerah Kota Singkawang tahun 2024 berpedoman pada landasan hukum atau aturan-aturan yang berlaku antara lain:

1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 Tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 4286);
2. Undang –Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 Tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (SPPN) (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 164, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 4421);
4. Undang –Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437), sebagaimana telah diubah kedua dengan Undang –Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 Tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Republik Indonesia 4438);
6. Undang-Undang Nomor 17 Tahun Tahun 2007 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33,Tambahan Lembaran Republik Indonesia 4700);
7. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Republik Indonesia 5587);

9. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 Tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah;
10. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 Tentang Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 19, Tambahan Lembaran Republik Indonesia 4815);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 Tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor Tambahan Lembaran Republik Indonesia 4817);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pelaksanaan Tugas dan Wewenang serta Kedudukan Keuangan Gubernur sebagai Wakil Pemerintah di Wilayah Provinsi;
13. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 Tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 6322);
14. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2015 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2015–2019 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 4833);
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 Tentang Perubahan Kedua Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006;
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 Tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan

Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;

17. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Barat Nomor 7 Tahun 2008 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2008 – 2028 (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2008 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Barat Nomor 6);
18. Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kota Singkawang Tahun 2010 Nomor 6);
19. Peraturan Daerah Kota Singkawang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Singkawang Tahun 2013-2032 (Lembaran Daerah Kota Singkawang Tahun 2014 Nomor 1);
20. Peraturan Daerah Kota Singkawang Nomor 3 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Singkawang (Lembaran Daerah Kota Singkawang Tahun 2016 Nomor 4);
21. Peraturan Daerah Kota Singkawang Nomor 36 Tahun 2022 Tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kota Singkawang Tahun 2023;
22. Peraturan Walikota Singkawang Nomor 78 Tahun 2021 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Badan Keuangan Daerah Kota Singkawang.

I.3 MAKSUD DAN TUJUAN

Penyusunan Renja Badan Keuangan Daerah (BKD) Kota Singkawang tahun 2024 disusun untuk menjadikan pedoman atau acuan bagi pihak-pihak yang berkepentingan, baik internal maupun eksternal lingkup kedinasan maupun tingkat Kota Singkawang dan merupakan penjabaran dari implementasi pelaksanaan Indikator Kinerja Tahun yang akan datang di dalam Rencana Strategis (Renstra) Badan Keuangan Daerah Kota Singkawang dalam menciptakan kesepakatan dan komitmen

bersama untuk mewujudkan Visi dan Misi Kota Singkawang tahun 2018-2022.

Tujuan dari penyusunan Renja Badan Keuangan Daerah Kota Singkawang tahun 2023 adalah sebagai berikut:

1. Menyusun Program dan kegiatan yang direncanakan tahun anggaran 2023;
2. Sebagai dokumen untuk mewujudkan sasaran-sasaran dalam dokumen Renstra Badan Keuangan Daerah tahun 2023-2026;
3. Menjadi alat untuk mengukur kinerja Badan Keuangan Daerah Kota Singkawang dengan pembandingan Renja tahun sebelumnya maupun tahun yang akan datang;
4. Pedoman dalam menyusun dokumen agenda pelaksanaan program dan kegiatan tahun 2024 berupa Kerangka Acuan Kerja (KAK) kegiatan tahun 2024;
5. Penetapan pelaksanaan Program kegiatan Badan Keuangan Daerah Kota Singkawang yang direncanakan dalam pembebanan Anggaran Pendapatan dan Belanja daerah (APBD) Kota Singkawang tahun 2024.

I.4 SISTEMATIKA PENULISAN

Sistematika penulisan Renja Badan Keuangan Daerah Kota Singkawang tahun 2024 adalah sebagai berikut:

Bab I Pendahuluan

Pada bab ini dijelaskan mengenai gambaran umum penyusunan Renja PD yang berisi latar belakang penyusunan rencana kerja, landasan hukum atau peraturan perundang-undangan yang melatar belakangi penyusunan rencana kerja, penjelasan mengenai maksud dan tujuan, serta sistematika bahasan tiap bab dalam Renja PD.

Bab II Evaluasi Pelaksanaan Renja PD Tahun lalu

Berisikan tentang evaluasi pelaksanaan Renja PD tahun lalu, analisis kinerja pelayanan PD, isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi PD, review terhadap rancangan awal PD dan penelaahan usulan program dan kegiatan masyarakat.

Bab III Tujuan dan Sasaran PD

Berisikan tentang telaahan terhadap kebijakan Nasional dan tugas pokok dan fungsi PD, tujuan dan sasaran Renja PD.

Bab IV Rencana kerja dan pendanaan

Berisikan rencana kerja kegiatan secara eksplisit yang disusun berdasarkan evaluasi pembangunan tahunan, kedudukan tahun rencana (Renja PD) dan capaian kinerja yang direncanakan Renstra PD.

Bab V Penutup

Memuat tentang catatan penting yang perlu mendapat perhatian mengenai pelaksanaan kinerja Renja tersebut dan mengevaluasi solusi dalam pemecahan masalah yang dihadapi dalam pelaksanaan Renja tersebut.

BAB II

EVALUASI PELAKSANAAN RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN LALU

II.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja-PD Tahun lalu dan Capaian Renstra PD

Evaluasi pelaksanaan rencana kerja tahun lalu dan pencapaian kinerja Renstra OPD ditujukan untuk mengidentifikasi dan mengetahui sampai sejauhmana kemampuan OPD dalam melaksanakan program dan kegiatan, mengidentifikasi realisasi pencapaian target kinerja program dan kegiatan Renstra SKPD, serta hambatan dan permasalahan yang dihadapi. Pencapaian target kinerja dinilai melalui suatu standar yang mampu menggambarkan tingkat keberhasilan dari program dan kegiatan yang direncanakan, berupa indikator dengan target kinerja sebagai instrumen penilaian.

Berdasarkan hasil kinerja yang dapat diukur secara akuntabilitas adalah program kegiatan yang telah dilaksanakan dalam penyusunan Rencana Kerja (Renja) tahun 2024 adalah evaluasi pelaksanaan renja tahun 2023 dan capaian kinerja renstra sampai dengan triwulan I tahun 2023 yang menjadi barometer dan tindak lanjut di tahun selanjutnya.

Badan Keuangan Daerah Kota Singkawang sampai dengan triwulan I tahun 2023 melaksanakan 4 (Empat) Program yang terinci dalam 15 (lima belas) kegiatan.

Hasil evaluasi pelaksanaan Renja Badan Keuangan Daerah Kota Singkawang tahun 2021 dan capaian Renstra sampai dengan triwulan I tahun 2022 tersaji dalam tabel 2.1 berikut:

Tabel 2.1
Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja Badan Keuangan Daerah Tahun 2021
dan Pencapaian Renstra Badan Keuangan Daerah s/d Triwulan I Tahun 2022
Kota Singkawang

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes)/ Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2022	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d dengan tahun n-3	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (n-2)			Target program dan kegiatan (Renja Perangkat Daerah tahun 2022)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun berjalan	
					Target renja perangkat daerah tahun 2021	Realisasi Renja Perangkat Daerah tahun 2021	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan (2022 tw I)	Tingkat capaian realisasi target renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10=(5+7+9)	11=(10/4)
5.02.01.	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Predikat Nilai Sakip	100%							
5.02.01.2.01.	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase Dokumen Perencanaan dan Evaluasi Kinerja yang disusun	100%		100%			100%		
5.02.01.2.01.01.	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen yang disusun	2 Dokumen		2 Dokumen	2 Dokumen	99,85	2 Dokumen	45,59%	45,59

5.02.01.2.01.02.	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen yang disusun	1 Dokumen						44,63%	44,63
5.02.01.2.01.03.	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen yang disusun	4 Dokumen		1 Dokumen	1 Dokumen	99,88	1 Dokumen	0%	0
5.02.01.2.01.04.	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen yang disusun	100%						58,65%	58,65
5.02.01.2.01.05.	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen yang disusun	4 Dokumen		4 Dokumen	4 Dokumen	99,88	4 Dokumen	0%	0
5.02.01.2.01.06.	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Dokumen yang disusun	2 Dokumen		2 Dokumen	2 Dokumen	89,93	2 Dokumen	0%	0
5.02.01.2.01.07.	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen yang disusun	100%		100%			100%	3,89%	3,89
5.02.01.2.02.	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Dokumen Keuangan yang disusun	100%		100%			100%		
5.02.01.2.02.01.	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Cakupan Gaji dan tunjangan ASN yang tersedia	100%		100%	90,54%	90,54	100%	49,19%	49,19
5.02.01.2.02.02.	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Pegawai Non-PNS yang menunjang pengelolaan keuangan BKD	100%		100%	99,28%	99,28	100%	41,92%	41,92
5.02.01.2.02.03.	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah dokumen yang disusun	5 Dokumen		5 Dokumen			5 Dokumen	0,81%	0,81
5.02.01.2.05.	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Cakupan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah yang dilaksanakan	100%		100%			100%		

5.02.01.2.05.02.	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah pakaian dinas yang diadakan	75 stel		75 stel	75 stel	100	75 stel		
5.02.01.2.05.09.	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah peserta diklat formal	100%		100%			100%		
5.02.01.2.06.	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Cakupan Administrasi Umum yang disediakan	100%		100%			100%		
5.02.01.2.06.01.	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Cakupan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang disediakan	100%		100%	99,99%	99,99	100%	37,51%	37,51
5.02.01.2.06.02.	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Cakupan alat tulis kantor yang disediakan	100%		100%	99,77%	99,77	100%	80,16%	80,16
5.02.01.2.06.03.	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Cakupan alat kebersihan dan perabot kantor yang disediakan	100%		100%	97,05%	97,05	100%	31,47%	31,47
5.02.01.2.06.05.	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	cakupan barang cetakan dan pengadaan yang disediakan	100%		100%	89,85%	89,85	100%	66,27%	66,27
5.02.01.2.06.06.	Penyediaan Bahan Bacaan dan peraturan Perundang-undangan	cakupan Bahan Bacaan dan peraturan Perundang-undangan yang disediakan	100%		100%	97,22%	97,22	100%	30,63%	30,63
5.02.01.2.06.09.	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	cakupan rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah yang disediakan	100%		100%	100%	100	100%	85,97%	85,97
5.02.01.2.07.	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Cakupan Pengadaan Barang Milik Daerah yang diadakan	100%		100%			100%		
5.02.01.2.07.02.	Penggadaan kendaraan Dinas Operasional atau lapangan	Jumlah kendaraan roda dua yang diadakan	100%		100%	89,14%	89,14	100%		
5.02.01.2.07.06.	Pengadaan Peralatan dan Mesin lainnya	Jumlah peralatan kantor yang diadakan	100%		100%	98,06%	98,06	100%	8,11%	8,11

5.02.01.2.07.09.	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung kantor atau bangunan lainnya	Cakupan peningkatan gedung kantor	100%		100%			100%	43,98%	43,98
5.02.01.2.08.	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Cakupan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang disediakan	100%		100%			100%		
5.02.01.2.08.01.	Penyediaan jasa surat menyurat	Cakupan jasa surat menyurat yang disediakan	100%		100%	78,32%	78,32	100%	15,96%	15,96
5.02.01.2.08.04.	Penyediaan jasa pelayanan Umum kantor	Cakupan konsumsi rapat, konsumsi tamu dan konsumsi pimpinan yang disediakan	100%		100%	95,91%	95,91	100%	15,52%	15,52
5.02.01.2.09.	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase SKPD yang telah menyampaikan Pemeliharaan Barang Milik Daerah	100%		100%			100%		
5.02.01.2.09.01.	Penyediaan jasa pemeliharaan, biaya pemeliharaan dan pajak kendaraan perorangan dinas atau kendaraan dinas jabatan	Cakupan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan jabatan yang disediakan	100%		100%			100%	41,47%	41,47
5.02.01.2.09.06.	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Cakupan peralatan gedung kantor yang dipelihara	100%		100%	99,97%	99,97	100%	46,66%	46,66
5.02.01.2.09.09.	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung kantor dan bangunan lainnya	Cakupan gedung kantor yang dipelihara	100%		100%			100%	54,50%	54,50
5.02.02.	Program Pengelolaan Keuangan Daerah		100%		100%			100%		
5.02.02.2.01.	Koordinasi dan Penyusunan Rencana Anggaran Daerah		100%		100%			100%		
5.02.02.2.01.01.	Koordinasi dan Penyusunan KUA dan PPAS	Persentase tercapainya Kesepakatan KUA PPAS	100%		100%	89,22%	89,22	100%	0%	0
5.02.02.2.01.02.	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan KUA dan PPAS	Persentase tercapainya Kesepakatan KUA PPAS Perubahan	100%		100%	92,12%	92,12	100%	0%	0

5.02.02.2.01.03.	Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi RKA-SKPD	Tercapainya persentase dokumen RKA SKPD yang terverifikasi	100%		100%	95,22%	95,22	100%	0%	0
5.02.02.2.01.04.	Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi Perubahan RKA-SKPD	Tercapainya persentase dokumen RKA SKPD yang terverifikasi	100%		100%	85,75%	85,75	100%	0%	0
5.02.02.2.01.05.	Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi DPA-SKPD	Persentase DPA dan DPA Perubahan SKPD yang dilakukan review	100%		100%	87,02%	87,02	100%	83,62%	83,62
5.02.02.2.01.06.	Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi Perubahan DPA-SKPD	Persentase DPA SKPD Perubahan yang terverifikasi	100%		100%	55,82%	55,82	100%	0%	0
5.02.02.2.01.07.	Koordinasi dan Penyusunan Peraturan Daerah tentang APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD	Persentase tercapainya Perda tentang APBD	100%		100%	85,60%	85,60	100%	26,70%	26,70
5.02.02.2.01.08.	Koordinasi dan Penyusunan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan APBD	Persentase tercapainya Perda tentang Perubahan APBD	100%		100%	66,28%	66,28	100%	35,12%	35,12
5.02.02.2.01.09.	Koordinasi dan Penyusunan Regulasi serta Kebijakan Bidang Anggaran	Persentase tercapainya Regulasi di Bidang Anggaran	100%		100%	36,48%	36,48	100%	0%	0
5.02.02.2.01.10.	Koordinasi Perencanaan Anggaran Pendapatan	Persentase Dokumen Perencanaan Pendapatan	100%		100%	86,28%	86,28	100%	0%	0
5.02.02.2.01.11.	Koordinasi Perencanaan Anggaran Belanja Daerah	Tercapainya Persentase Dokumen Perencanaan Belanja Daerah	100%		100%	91,08%	91,08	100%	0%	0

5.02.02.2.02.	Koordinasi dan Pengelolaan Perbendaharaan Daerah		100%		100%			100%		
5.02.02.2.02.01.	Koordinasi dan Pengelolaan Kas Daerah	Persentase OPD yang menyusun dokumen rencana anggaran tepat waktu	100%		100%	99,86%	99,86	100%	0%	0
5.02.02.2.02.03.	Penyiapan, Pelaksanaan Pengendalian dan Penerbitan Anggaran Kas dan SPD	Jumlah Dokumen Pengendalian administrasi penyediaan dana	100%		100%	99,35%	99,35	100%	0%	0
5.02.02.2.02.05.	Koordinasi, Fasilitasi, Asistensi, Sinkronisasi, Supervisi, Monitoring dan Evaluasi Pengelolaan Dana Perimbangan dan Dana Transfer lainnya	Cakupan SP2D belanja langsung yang diterbitkan	100%		100%	99,96%	99,96	100%	36,89%	36,89
5.02.02.2.02.07.	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Realisasi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah, Laporan Aliran Kas dan Pelaksanaan Pemungutan/Pemotongan dan Penyetoran Perhitungan Pihak Ketiga(PFK)	Jumlah laporan rekapitulasi pemotongan pajak pegawai/pihak ketiga	100%		100%	100%	100	100%	0%	0
5.02.02.2.02.09.	Rekonsiliasi Data Penerimaan dan Pengeluaran kas serta Pemungutan dan Pemotongan Atas SP2D dengan Instansi terkait	Persentase OPD yang menyusun dokumen rencana anggaran tepat waktu	100%		100%	97,23%	97,23	100%	62,58%	62,58
5.02.02.2.02.10.	Penyusunan Petunjuk Teknis Administrasi Keuangan yang berkaitan dengan Penerimaan dan Pengeluaran Kas serta Penatausahaan dan Pertanggungjawaban Sub Kegiatan	Jumlah dokumen yang disusun	100%		100%	79,91%	79,91	100%		
5.02.02.2.03.	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Daerah	Persentase OPD yang telah menyampaikan Laporan Keuangan tepat waktu	100%		100%			100%		

5.02.02.2.03.02.	Rekonsiliasi dan Verifikasi Aset, Kewajiban, Ekuitas, Pendapatan, Belanja, Pembiayaan, Pendapatan-LO dan Beban	Persentase OPD yang menyusun dokumen rencana anggaran tepat waktu	100%		100%			100%		
5.02.02.2.03.03.	Koordinasi Penyusunan Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Bulanan, Triwulan dan Semesteran	Jumlah dokumen yang disusun	100%		100%	100%	100	100%		
5.02.02.2.03.04.	Konsolidasi Laporan Keuangan SKPD, BLUD dan Laporan Keuangan PEMDA	Jumlah laporan yang disusun	100%		100%	99,88%	99,88	100%	60%	60
5.02.02.2.03.05.	Koordinasi dan Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Provinsi dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD kabupaten/kota	Jumlah dokumen yang disusun	100%		100%	99,20%	99,20	100%	47,96%	47,96
5.02.02.2.03.08.	Penyusunan Analisis Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD	Jumlah dokumen	100%		100%	100%	100	100%		
5.02.02.2.03.09.	Penyusunan Kebijakan dan Panduan Teknis Operasional Penyelenggaraan Akuntansi Pemerintah Daerah	Jumlah dokumen	100%		100%	100%	100	100%		
5.02.02.2.03.11.	Pembinaan Akuntansi, Pelaporan dan Pertanggungjawaban Pemerintah Kabupaten/Kota	Jumlah OPD yang mendapatkan pembinaan dan sosialisasi	100%		100%			100%		
5.02.02.2.04	Penunjang Urusan Kewenangan Pengelolaan Keuangan Daerah		100%		100%			100%		

5.02.02.2.04.09.	Pengelolaan Dana Darurat dan Mendesak	Terpenuhinya belanja tidak terduga	100%		100%	64,09%	64,09	100%	8,01%	8,01
5.02.03.	Program Pengelolaan Barang Milik Daerah		100%		100%			100%		
5.02.03.2.01.	Pengelolaan Barang Milik Daerah		100%		100%			100%		
5.02.03.2.01.03.	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah	Persentase OPD yang menyampaikan dokumen RKBMD	100%		100%	77,78%	77,78	100%	88,07%	88,07
5.02.03.2.01.05.	Penatausahaan Barang Milik Daerah	Jumlah Dokumen penatausahaan BMD berupa laporan semesteran dan tahunan	100%		100%	77,01%	77,01	100%	29,24%	29,24
5.02.03.2.01.06.	Inventarisasi Barang Milik Daerah	Jumlah dokumen	100%		100%			100%		
5.02.03.2.01.07.	Pengamanan Barang Milik Daerah	Jumlah dokumen kepemilikan BMD	100%		100%	95,59%	95,59	100%	25,62%	25,62
5.02.03.2.01.08.	Penilaian Barang Milik Daerah	Jumlah dokumen Penilaian BMD	100%		100%	96,96%	96,96	100%	0%	0
5.02.03.2.01.10.	Optimalisasi Penggunaan, Pemanfaatan, Pemindahtanganan, Pemusnahan dan Penghapusan Barang Milik Daerah	Jumlah dokumen yang disusun	100%		100%	78,72%	78,72	100%	25,91%	25,91

5.02.03.2.01.11.	Rekonsiliasi dalam rangka Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah	Sinkronisasi Penatausahaan dan penyajian laporan barang untuk daerah kota singkawang	100%		100%	83,73%	83,73	100%	0%	0
5.02.04.	Program Pengelolaan Pendapatan Daerah	Persentase Penerimaan Pendapatan Asli Daerah (PAD) terhadap target	100%		100%			100%		
5.02.04.2.01.	Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah	Persentase Peningkatan Pajak Daerah Sektor PBB dan BPHTB	100%		100%			100%		
5.02.04.2.01.01.	Perencanaan Pengelolaan Pajak Daerah	Jumlah Dokumen yang disusun	100%		100%			100%		
5.02.04.2.01.02.	Analisa dan Pengembangan Pajak Daerah, serta Penyusunan Kebijakan Pajak Daerah	Jumlah dokumen yang disusun	100%		100%	84,54%	84,54	100%		
5.02.04.2.01.03.	Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Pajak Daerah	Jumlah Dokumen yang disusun	100%	-	100%	94,47%	94,47	100%	0%	0
5.02.04.2.01.04.	Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengelolaan Pajak Daerah	Cakupan sarana dan prasarana pajak daerah yang diadakan	100%		100%	96,99%	96,99	100%	0%	0
5.02.04.2.01.05.	Pendataan dan Pendaftaran Objek Pajak Daerah	Jumlah Dokumen yang disusun	100%		100%	88,18%	88,18	100%	41,30%	41,30
5.02.04.2.01.06.	Pengolahan, Pemeliharaan, dan Pelaporan Basis Data Pajak Daerah	Jumlah Dokumen yang disusun	100%		100%	80,07%	80,07	100%	14,16%	14,16

5.02.04.2.01.07.	Penilaian Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBBP2) serta Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB)	Jumlah Dokumen yang disusun	100%		100%	91,65%	91,65	100%	34,06%	34,06
5.02.04.2.01.08.	Penetapan Wajib Pajak Daerah	Jumlah Dokumen yang disusun	100%		100%	90,28%	90,28	100%	24,70%	24,70
5.02.04.2.01.09.	Pelayanan dan Konsultasi Pajak Daerah	Jumlah Dokumen yang disusun	100%		100%	71,60%	71,60	100%	37,92%	37,92
5.02.04.2.01.10.	Penelitian dan Verifikasi Data Pelaporan Pajak Daerah	Jumlah Dokumen yang disusun	100%		100%	98,13%	98,13	100%	12,21%	12,21
5.02.04.2.01.11.	Penagihan Pajak Daerah	Jumlah Dokumen yang disusun	100%		100%	96,73%	96,73	100%	4,01%	4,01
5.02.04.2.01.12.	Penyelesaian Keberatan Pajak Daerah	Jumlah Dokumen yang disusun	100%		100%	99,70%	99,70	100%	62,24%	62,24
5.02.04.2.01.13.	Pengendalian, Pemeriksaan dan Pengawasan Pajak Daerah	Jumlah Dokumen yang disusun	100%		100%	99,63%	99,63	100%	18,57%	18,57
5.02.04.2.01.14.	Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Retribusi Daerah	Jumlah Dokumen yang disusun	100%		100%	80,83%	80,83	100%		

Berdasarkan tabel 2.1 diatas dapat diuraikan beberapa hal diantaranya :

- a. Realisasi program/kegiatan yang tidak memenuhi target kinerja hasil/keluaran yang direncanakan, antara lain:
 1. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah;
 - Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
 - Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
 - Administrasi Umum Perangkat Daerah
 - Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
 - Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
 - Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
 2. Program Pengelolaan Keuangan Daerah;
 - Koordinasi dan Penyusunan Rencana Anggaran Daerah
 - Koordinasi dan Pengelolaan Perbendaharaan Daerah
 3. Program Pengelolaan Barang Milik Daerah;
 - Pengelolaan Barang Milik Daerah
 4. Program Pengelolaan Pendapatan Daerah;
 - Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah
- b. Faktor-faktor penyebab tidak tercapainya target kinerja program/kegiatan adalah :
 1. Program kegiatan tidak dilaksanakan.
 2. Tidak dianggarkannya Program kegiatan tersebut dalam dokumen pelaksanaan anggaran (DPA) 2020 dan 2021 maupun dokumen pelaksanaan perubahan anggaran 2020.

II.2 Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah

Analisis pencapaian kinerja Badan Keuangan Daerah Kota Singkawang dari 1 (satu) sasaran dan 2 (dua) indikator yang telah ditetapkan didalam perjanjian kinerja (Perjankin) tahun 2021 dan Indikator Kinerja Utama (IKU) dapat dilihat pada tabel 2.2 berikut:

Tabel 2.2
Pencapaian Kinerja Pelayanan Badan Keuangan Daerah
Kota Singkawang

No	Indikator	SPM/Standar Nasional	IKK	Target Renstra BKD				Realisasi Capaian		Proyeksi			Catatan Analisis
				Tahun 2018	Tahun 2019	Tahun 2020	Tahun 2021	Tahun 2018	Tahun 2019	Tahun 2020	Tahun 2021	Tahun 2022	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	Persentase PAD Terhadap Pendapatan	-	-	14,99	15,87	16,60	17,14	14,89	n/a	16,60	17,14		
	Persentase peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD)												
2	Opini BPK Terhadap Laporan Keuangan	-	-	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	n/a	WTP	WTP		

II.3 Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah

Setelah dilakukan analisa atas hasil evaluasi dalam pencapaian sasaran strategis Badan Keuangan Daerah Kota Singkawang maka terdapat beberapa isu penting penyelenggaraan perumusan isu-isu penting tersebut memiliki maksud untuk menentukan permasalahan, hambatan atas pelaksanaan program dan kegiatan penyelenggaraan fungsi penunjang Pemerintah bidang keuangan daerah berdasarkan hasil evaluasi pelaksanaan Renja PD tahun sebelumnya, serta capaian kinerja Renstra Badan Keuangan Daerah (BKD). Adapun isu penting terkait penyelenggaraan fungsi penunjang Pemerintah bidang keuangan oleh BKD adalah sebagai berikut:

1. Kontribusi Pendapatan Asli Daerah (PAD) terhadap pendapatan masih rendah;
2. Administrasi perencanaan, penatausahaan dan pemanfaatan aset daerah belum tertib;
3. Masih terdapat OPD yang tidak konsisten dalam melaksanakan kegiatan dengan rencana yang telah dituangkan dalam DPA SKPD, sehingga penyerapan dana sebagian besar di akhir tahun anggaran;
4. Keterbatasan sumber daya manusia, sarana dan prasarana.

II.4 Review terhadap rancangan awal RKPD

Maksud dilaksanakan telaahan terhadap rancangan awal RKPD untuk membandingkan antara rumusan hasil identifikasi kebutuhan program dan kegiatan berdasarkan analisis kebutuhan yang telah mempertimbangkan kinerja pencapaian target Renstra OPD dan tingkat kinerja yang dicapai oleh OPD, dengan arahan kepala daerah terkait prioritas program/kegiatan dan pagu indikatif yang disediakan untuk setiap OPD berdasarkan rancangan awal RKPD. Review terhadap rancangan awal RKPD, meliputi kegiatan identifikasi prioritas program dan kegiatan, indikator kinerja program/kegiatan, tolok ukur atau target sasaran program/kegiatan, serta pagu indikatif yang dialokasikan untuk setiap program/kegiatan untuk OPD yang bersangkutan. Adapun telaah terhadap

rancangan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) pada BKD adalah sebagai berikut:

Tabel 2.3
Review terhadap Rancangan Awal RKPD tahun 2024
Kota Singkawang (rancangan renja 2024 mapping)

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp)	Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana (Rp)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
I	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		Predikat Nilai Sakip		11.519.122.982	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		Predikat Nilai Sakip	BB	11.519.122.982	
	Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		Persentase Dokumen Perencanaan dan Evaluasi Kinerja yang disusun	100%	45.000.000	Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		Persentase Dokumen Perencanaan dan Evaluasi Kinerja yang disusun	100%	45.000.000	
1	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah		Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	3 dokumen	10.000.000	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah		Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	3 Dokumen	10.000.000	
2	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA- SKPD		Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA- SKPD	1 dokumen	5.000.000	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA- SKPD		Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA- SKPD	1 Dokumen	5.000.000	
3	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA- SKPD		Jumlah Dokumen Perubahan RKA- SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan	1 dokumen	5.000.000	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA- SKPD		Jumlah Dokumen Perubahan RKA- SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan	1 Dokumen	5.000.000	

			Dokumen Perubahan RKA- SKPD					Dokumen Perubahan RKA- SKPD			
4	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen DPA- SKPD		Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA- SKPD	1 dokumen	5.000.000	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen DPA- SKPD		Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA- SKPD	1 dokumen	5.000.000	
5	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD		Jumlah Dokumen Perubahan DPA- SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA- SKPD	1 dokumen	5.000.000	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD		Jumlah Dokumen Perubahan DPA- SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA- SKPD	1 dokumen	5.000.000	
6	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD		Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	2 dokumen	5.000.000	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Pencapaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD		Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	2 dokumen	5.000.000	
7	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	3 dokumen	10.000.000	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	3 dokumen	10.000.000	
	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah		Persentase Dokumen Keuangan yang disusun	100%	9.319.122.982	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah		Persentase Dokumen Keuangan yang disusun	100%	9.319.122.982	

8	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN		Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	100%	8.198.569.382	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN		Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	100%	8.198.569.382	
9	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN		Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	100%	1.085.553.600	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN		Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	100%	1.085.553.600	
10	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD		Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	100%	10.000.000	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD		Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	100%	10.000.000	
11	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD		Jumlah Dokumen Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	100%	5.000.000	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD		Jumlah Dokumen Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	100%	5.000.000	
12	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD		Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1 dokumen	5.000.000	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD		Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1 dokumen	5.000.000	
13	Pengelolaan dan Penyajian Bahan Tanggapan Pemeriksaan		Jumlah Dokumen Bahan Tanggapan Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Pemeriksaan	2 dokumen	5.000.000	Pengelolaan dan Penyajian Bahan Tanggapan Pemeriksaan		Jumlah Dokumen Bahan Tanggapan Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Pemeriksaan	2 dokumen	5.000.000	

14	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan /Semesteran SKPD		Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan an/Semesteran SKPD	2 dokumen	5.000.000	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan /Semesteran SKPD		Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan an/Semesteran SKPD	2 dokumen	5.000.000	
15	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran		Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	2 dokumen	5.000.000	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran		Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	2 dokumen	5.000.000	
	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah		Cakupan Administrasi Aset yang dilaksanakan	100 %	35.000.000	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah		Cakupan Administrasi Aset yang dilaksanakan	100 %	35.000.000	
16	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD		Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	1 dokumen	5.000.000	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD		Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	1 dokumen	5.000.000	
17	Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD		Jumlah Dokumen Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	1 dokumen	5.000.000	Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD		Jumlah Dokumen Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	1 dokumen	5.000.000	

18	Koordinasi dan Penilaian Barang Milik Daerah SKPD		Jumlah Laporan Hasil Penilaian Barang Milik Daerah dan Hasil Koordinasi Penilaian Barang Milik Daerah SKPD	1 dokumen	5.000.000	Koordinasi dan Penilaian Barang Milik Daerah SKPD		Jumlah Laporan Hasil Penilaian Barang Milik Daerah dan Hasil Koordinasi Penilaian Barang Milik Daerah SKPD	1 dokumen	5.000.000	
19	Pembinaan, Pengawasan dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD		Jumlah Laporan Hasil Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD	1 dokumen	5.000.000	Pembinaan, Pengawasan dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD		Jumlah Laporan Hasil Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD	1 dokumen	5.000.000	
20	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD		Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	1 dokumen	5.000.000	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD		Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	1 dokumen	5.000.000	
21	Penatausahaan Barang Milik Daerah SKPD		Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	1 dokumen	5.000.000	Penatausahaan Barang Milik Daerah SKPD		Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	1 dokumen	5.000.000	

22	Pemanfaatan Barang Milik Daerah SKPD		Jumlah Dokumen Hasil Pemanfaatan Barang Milik Daerah SKPD	1 dokumen	5.000.000	Pemanfaatan Barang Milik Daerah SKPD		Jumlah Dokumen Hasil Pemanfaatan Barang Milik Daerah SKPD	1 dokumen	5.000.000	
	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah		Cakupan Administrasi kepegawaian yang dilaksanakan	100%	100.000.000	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah		Cakupan Administrasi kepegawaian yang dilaksanakan	100%	100.000.000	
23	Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai		Jumlah Unit Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai	1 dokumen	5.000.000	Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai		Jumlah Unit Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai	1 dokumen	5.000.000	
24	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya		Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	65 stel	70.000.000	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya		Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	65 stel	70.000.000	
25	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian		Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	1 dokumen	5.000.000	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian		Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	1 dokumen	5.000.000	

26	Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian		Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian	1 dokumen	5.000.000	Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian		Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian	1 dokumen	5.000.000	
27	Monitoring, Evaluasi dan Penilaian Kinerja Pegawai		Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	1 dokumen	5.000.000	Monitoring, Evaluasi dan Penilaian Kinerja Pegawai		Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	1 dokumen	5.000.000	
28	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai berdasarkan Tugas dan Fungsi		Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	10 orang	10.000.000	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai berdasarkan Tugas dan Fungsi		Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	10 orang	10.000.000	
	Administrasi Umum Perangkat Daerah		Cakupan Administrasi Umum yang dilaksanakan	100%	620.000.000	Administrasi Umum Perangkat Daerah		Cakupan Administrasi Umum yang dilaksanakan	100%	620.000.000	
29	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor		Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	100%	30.000.000	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor		Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	100%	30.000.000	

30	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan		Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	100%	20.000.000	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan		Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	100%	20.000.000	
31	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga		Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	100%	20.000.000	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga		Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	100%	20.000.000	
32	Penyediaan Bahan Logistik Kantor		Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	100 %	5.000.000	Penyediaan Bahan Logistik Kantor		Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	100 %	5.000.000	
33	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan		Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	100%	10.000.000	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan		Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	100%	10.000.000	
34	Penyediaan Bahan bacaan dan Peraturan perundang-undangan		Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	100%	5.000.000	Penyediaan Bahan bacaan dan Peraturan perundang-undangan		Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	100%	5.000.000	

35	Fasilitasi Kunjungan Tamu		Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	100 %	10.000.000	Fasilitasi Kunjungan Tamu		Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	100 %	10.000.000	
36	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD		Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	100%	500.000..000	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD		Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	100%	500.000..000	
37	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD		Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	100 %	10.000.000	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD		Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	100 %	10.000.000	
38	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintah berbasis Elektronik pada SKPD		Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	100 %	10.000.000	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintah berbasis Elektronik pada SKPD		Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	100 %	10.000.000	
	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah		Cakupan Pengadaan Barang Milik Daerah yang disediakan	100%	680.000.000	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah		Cakupan Pengadaan Barang Milik Daerah yang disediakan	100%	680.000.000	

39	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan		Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan	1 unit	300.000.000	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan		Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan	1 unit	300.000.000	
40	Pengadaan kendaraan dinas operasional atau lapangan		Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	3 unit	70.000.000	Pengadaan kendaraan dinas operasional atau lapangan		Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	3 unit	70.000.000	
41	Pengadaan Mebel		Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	100%	30.000.000	Pengadaan Mebel		Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	100%	30.000.000	
42	Pengadaan Peralatan dan Mesin lainnya		Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	100%	20.000.000	Pengadaan Peralatan dan Mesin lainnya		Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	100%	20.000.000	
43	Pengadaan Aset tak berwujud		Jumlah Unit Aset Tak Berwujud yang Disediakan	100 %	20.000.000	Pengadaan Aset tak berwujud		Jumlah Unit Aset Tak Berwujud yang Disediakan	100 %	20.000.000	
44	Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan lainnya		Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	100%	80.000.000	Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan lainnya		Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	100%	80.000.000	
45	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya		Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan	100%	80.000.000	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya		Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan	100%	80.000.000	

			Lainnya yang Disediakan					Lainnya yang Disediakan			
46	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya		Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	100%	80.000.000	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya		Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	100%	80.000.000	
	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		Cakupan penunjang urusan pemerintahan daerah yang disediakan		400.000.000	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		Cakupan penunjang urusan pemerintahan daerah yang disediakan		400.000.000	
47	Penyediaan Jasa Surat Menyurat		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	100 %	20.000.000	Penyediaan Jasa Surat Menyurat		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	100 %	20.000.000	
48	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	100 %	300.000.000	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	100 %	300.000.000	
49	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	100 %	80.000.000	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	100 %	80.000.000	

	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		Cakupan pemeliharaan BMD penunjang urusan pemerintahan daerah yang diadakan	100%	320.000.000	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		Cakupan pemeliharaan BMD penunjang urusan pemerintahan daerah yang diadakan	100%	320.000.000	
50	Penyediaan jasa pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak Kendaraan perorangan dinas atau kendaraan dinas jabatan		Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	100%	20.000.000	Penyediaan jasa pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak Kendaraan perorangan dinas atau kendaraan dinas jabatan		Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	100%	20.000.000	
51	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau lapangan		Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	100%	60.000.000	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau lapangan		Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	100%	60.000.000	
52	Pemeliharaan Mebel		Jumlah Mebel yang Dipelihara	100 %	60.000.000	Pemeliharaan Mebel		Jumlah Mebel yang Dipelihara	100 %	60.000.000	
53	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin lainnya		Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	100%	60.000.000	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin lainnya		Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	100%	60.000.000	
54	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung kantor dan Bangunan lainnya		Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang	100%	60.000.000	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung kantor dan Bangunan lainnya		Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang	100%	60.000.000	

			Dipelihara/Direhabilitasi					Dipelihara/Direhabilitasi			
55	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya		Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	100%	60.000.000	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya		Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	100%	60.000.000	
II	Program Pengelolaan Keuangan Daerah				13.083.012.097	Program Pengelolaan Keuangan Daerah				13.083.012.097	
	Koordinasi dan Penyusunan Rencana Anggaran Daerah		Persentase SKPD yang menyusun Dokumen Rencana Anggaran tepat waktu	100%	1.096.110.321	Koordinasi dan Penyusunan Rencana Anggaran Daerah		Persentase SKPD yang menyusun Dokumen Rencana Anggaran tepat waktu	100%	1.096.110.321	
56	Koordinasi dan Penyusunan KUA dan PPAS		Jumlah Dokumen KUA dan PPAS yang Disusun	100%	120.000.000	Koordinasi dan Penyusunan KUA dan PPAS		Jumlah Dokumen KUA dan PPAS yang Disusun	100%	120.000.000	
57	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan KUA dan Perubahan PPAS		Jumlah Dokumen Perubahan KUA dan Perubahan PPAS yang Disusun	100%	120.000.000	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan KUA dan Perubahan PPAS		Jumlah Dokumen Perubahan KUA dan Perubahan PPAS yang Disusun	100%	120.000.000	

58	Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi RKA-SKPD		Jumlah RKA-SKPD yang Diverifikasi	100%	40.000.000	Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi RKA-SKPD		Jumlah RKA-SKPD yang Diverifikasi	100%	40.000.000	
59	Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi Perubahan RKA-SKPD		Jumlah Perubahan RKA-SKPD yang Diverifikasi	100%	40.000.000	Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi Perubahan RKA-SKPD		Jumlah Perubahan RKA-SKPD yang Diverifikasi	100%	40.000.000	
60	Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi DPA-SKPD		Jumlah DPA-SKPD yang Diverifikasi	100%	20.800.000	Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi DPA-SKPD		Jumlah DPA-SKPD yang Diverifikasi	100%	20.800.000	
61	Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi Perubahan DPA-SKPD		Jumlah Perubahan DPA-SKPD yang Diverifikasi	100%	20.800.000	Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi Perubahan DPA-SKPD		Jumlah Perubahan DPA-SKPD yang Diverifikasi	100%	20.800.000	
62	Koordinasi dan Penyusunan Peraturan Daerah tentang APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD		Jumlah Peraturan Daerah tentang APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD	100%	200.000.000	Koordinasi dan Penyusunan Peraturan Daerah tentang APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD		Jumlah Peraturan Daerah tentang APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD	100%	200.000.000	
63	Koordinasi dan Penyusunan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan APBD		Jumlah Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan APBD	100%	180.600.000	Koordinasi dan Penyusunan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan APBD		Jumlah Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan APBD	100%	180.600.000	

64	Koordinasi dan Penyusunan Regulasi serta Kebijakan Bidang Anggaran		Jumlah Dokumen Regulasi serta Kebijakan Bidang Anggaran	100%	50.000.000	Koordinasi dan Penyusunan Regulasi serta Kebijakan Bidang Anggaran		Jumlah Dokumen Regulasi serta Kebijakan Bidang Anggaran	100%	50.000.000	
65	Koordinasi Perencanaan Anggaran Pendapatan		Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi Perencanaan Anggaran Pendapatan	100%	20.500.000	Koordinasi Perencanaan Anggaran Pendapatan		Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi Perencanaan Anggaran Pendapatan	100%	20.500.000	
66	Koordinasi Perencanaan Anggaran Belanja Daerah		Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi Perencanaan Anggaran Belanja Daerah	100%	140.000.000	Koordinasi Perencanaan Anggaran Belanja Daerah		Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi Perencanaan Anggaran Belanja Daerah	100%	140.000.000	
67	Koordinasi Perencanaan Anggaran Pembiayaan		Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi Perencanaan Anggaran Pembiayaan	100 %	143.410.321	Koordinasi Perencanaan Anggaran Pembiayaan		Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi Perencanaan Anggaran Pembiayaan	100 %	143.410.321	
	Koordinasi dan Pengelolaan Perbendaharaan Daerah		Persentase OPD yang menyusun dokumen rencana anggaran tepat waktu		321.600.00000	Koordinasi dan Pengelolaan Perbendaharaan Daerah		Persentase OPD yang menyusun dokumen rencana anggaran tepat waktu		321.600.00000	
68	Koordinasi Pengelolaan Kas Daerah		Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pengelolaan Kas Daerah	12 bulan	40.300.000	Koordinasi Pengelolaan Kas Daerah		Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pengelolaan Kas Daerah	12 bulan	40.300.000	
69	Penyiapan, Pelaksanaan Pengendalian dan Penerbitan Anggaran Kas dan SPD		Jumlah Dokumen Hasil Pengendalian dan Penerbitan Anggaran Kas dan SPD	4 dokumen	20.400.000	Penyiapan, Pelaksanaan Pengendalian dan Penerbitan Anggaran Kas dan SPD		Jumlah Dokumen Hasil Pengendalian dan Penerbitan Anggaran Kas dan SPD	4 dokumen	20.400.000	

70	Koordinasi, Fasilitas, Asistensi, Sinkronisasi, Supervisi, Monitoring dan Evaluasi Pengelolaan Dana Perimbangan dan Dana Transfer Lainnya		Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Fasilitas, Asistensi, Sinkronisasi, Supervisi, Monitoring, dan Evaluasi Pengelolaan Dana Perimbangan dan Dana Transfer Lainnya	12 dokumen	170.000.000	Koordinasi, Fasilitas, Asistensi, Sinkronisasi, Supervisi, Monitoring dan Evaluasi Pengelolaan Dana Perimbangan dan Dana Transfer Lainnya		Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Fasilitas, Asistensi, Sinkronisasi, Supervisi, Monitoring, dan Evaluasi Pengelolaan Dana Perimbangan dan Dana Transfer Lainnya	12 dokumen	170.000.000	
71	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Realisasi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah, Laporan Aliran Kas, dan Pelaksanaan Pemungutan/Pemotongan dan Penyetoran Perhitungan Pihak Ketiga/PFK		Jumlah Laporan Realisasi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah, Laporan Aliran Kas, dan Pelaksanaan Pemungutan/Pemotongan dan Penyetoran Perhitungan Pihak Ketiga (PFK) dan Laporan Hasil Koordinasi dalam rangka Penyusunan Laporan Realisasi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah, Laporan Aliran Kas, dan Pelaksanaan Pemungutan/Pemotongan dan Penyetoran Perhitungan Pihak Ketiga (PFK)	12 Laporan	5.000.000	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Realisasi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah, Laporan Aliran Kas, dan Pelaksanaan Pemungutan/Pemotongan dan Penyetoran Perhitungan Pihak Ketiga/PFK		Jumlah Laporan Realisasi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah, Laporan Aliran Kas, dan Pelaksanaan Pemungutan/Pemotongan dan Penyetoran Perhitungan Pihak Ketiga (PFK) dan Laporan Hasil Koordinasi dalam rangka Penyusunan Laporan Realisasi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah, Laporan Aliran Kas, dan Pelaksanaan Pemungutan/Pemotongan dan Penyetoran Perhitungan Pihak Ketiga (PFK)	12 Laporan	5.000.000	

72	Rekonsiliasi Data Penerimaan dan Pengeluaran Kas serta Pemungutan dan Pemotongan atas SP2D dengan Instansi terkait		Jumlah Dokumen Hasil Rekonsiliasi Data Penerimaan dan Pengeluaran Kas serta Pemungutan dan Pemotongan atas SP2D dengan Instansi Terkait	12 bulan	40.700.000	Rekonsiliasi Data Penerimaan dan Pengeluaran Kas serta Pemungutan dan Pemotongan atas SP2D dengan Instansi terkait		Jumlah Dokumen Hasil Rekonsiliasi Data Penerimaan dan Pengeluaran Kas serta Pemungutan dan Pemotongan atas SP2D dengan Instansi Terkait	12 bulan	40.700.000	
73	Penyusunan Petunjuk teknis Administrasi Keuangan yang berkaitan dengan Penerimaan dan Pengeluaran Kas serta Penatausahaan dan Pertanggungjawaban Sub Kegiatan		Jumlah Petunjuk Teknis Administrasi Keuangan yang Berkaitan dengan Penerimaan dan Pengeluaran Kas serta Penatausahaan dan Pertanggungjawaban Sub Kegiatan	1 dokumen	45.200.000	Penyusunan Petunjuk teknis Administrasi Keuangan yang berkaitan dengan Penerimaan dan Pengeluaran Kas serta Penatausahaan dan Pertanggungjawaban Sub Kegiatan		Jumlah Petunjuk Teknis Administrasi Keuangan yang Berkaitan dengan Penerimaan dan Pengeluaran Kas serta Penatausahaan dan Pertanggungjawaban Sub Kegiatan	1 dokumen	45.200.000	
	Koordinasi dan Pelaksanaan Akutansi dan Pelaporan Keuangan Daerah		Persentase OPD yang telah menyampaikan Laporan Keuangan tepat waktu	100%	318.900.000	Koordinasi dan Pelaksanaan Akutansi dan Pelaporan Keuangan Daerah		Persentase OPD yang telah menyampaikan Laporan Keuangan tepat waktu	100%	318.900.000	
74	Rekonsiliasi dan Verifikasi Aset, Kewajiban, Ekuitas, Pendapatan, Belanja, Pembiayaan, Pendapatan-LO dan Beban		Jumlah Dokumen Hasil Rekonsiliasi dan Verifikasi Aset, Kewajiban, Ekuitas, Pendapatan, Belanja, Pembiayaan, Pendapatan-LO, dan Beban	12 bulan	4.200.000	Rekonsiliasi dan Verifikasi Aset, Kewajiban, Ekuitas, Pendapatan, Belanja, Pembiayaan, Pendapatan-LO dan Beban		Jumlah Dokumen Hasil Rekonsiliasi dan Verifikasi Aset, Kewajiban, Ekuitas, Pendapatan, Belanja, Pembiayaan, Pendapatan-LO, dan Beban	12 bulan	4.200.000	

75	Koordinasi Penyusunan Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Bulanan, Triwulan dan Semesteran		Jumlah Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Bulanan, Triwulan dan Semesteran	1 dokumen	9.700.000	Koordinasi Penyusunan Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Bulanan, Triwulan dan Semesteran		Jumlah Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Bulanan, Triwulan dan Semesteran	1 dokumen	9.700.000	
76	Konsolidasi Laporan Keuangan SKPD,BLUD dan Laporan Keuangan Keuangan PEMDA		Jumlah Laporan Keuangan SKPD, BLUD dan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah yang Terkonsolidasi	7 Laporan	200.000.000	Konsolidasi Laporan Keuangan SKPD,BLUD dan Laporan Keuangan Keuangan PEMDA		Jumlah Laporan Keuangan SKPD, BLUD dan Laporan Keuangan Keuangan Pemerintah Daerah yang Terkonsolidasi	7 Laporan	200.000.000	
77	Koordinasi dan Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Provinsi dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota		Jumlah Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota	1 dokumen	60.000.000	Koordinasi dan Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Provinsi dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota		Jumlah Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota	1 dokumen	60.000.000	
78	Penyusunan Analisis Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD		Jumlah Dokumen Hasil Analisis Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD	2 dokumen	5.000.000	Penyusunan Analisis Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD		Jumlah Dokumen Hasil Analisis Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD	2 dokumen	5.000.000	

79	Penyusunan Kebijakan dan Panduan Teknis Operasional Penyelenggaraan Akuntansi Pemerintah Daerah		Jumlah Kebijakan dan Panduan Teknis Operasional Penyelenggaraan Akuntansi Pemerintah Daerah	2 dokumen	10.000.000	Penyusunan Kebijakan dan Panduan Teknis Operasional Penyelenggaraan Akuntansi Pemerintah Daerah		Jumlah Kebijakan dan Panduan Teknis Operasional Penyelenggaraan Akuntansi Pemerintah Daerah	2 dokumen	10.000.000	
	Penunjang Urusan Kewenangan Pengelolaan Keuangan Daerah		Persentase Realisasi belanja tidak terduga	100%	10.968.229.166	Penunjang Urusan Kewenangan Pengelolaan Keuangan Daerah		Persentase Realisasi belanja tidak terduga	100%	10.968.229.166	
80	Analisis Perencanaan dan Pelaksanaan Penerimaan Pinjaman Pemerintah Daerah		Jumlah Laporan Hasil Analisis Perencanaan dan Pelaksanaan Penerimaan Pinjaman Pemerintah Daerah	1 dokumen	968.229.166	Analisis Perencanaan dan Pelaksanaan Penerimaan Pinjaman Pemerintah Daerah		Jumlah Laporan Hasil Analisis Perencanaan dan Pelaksanaan Penerimaan Pinjaman Pemerintah Daerah	1 dokumen	968.229.166	
81	Pengelolaan Dana Darurat dan Mendesak		Jumlah Laporan Hasil Pengelolaan Dana Darurat dan Mendesak	1 tahun	10.000.000.000	Pengelolaan Dana Darurat dan Mendesak		Jumlah Laporan Hasil Pengelolaan Dana Darurat dan Mendesak	1 tahun	10.000.000.000	
	Pengelolaan Data dan Implementasi Sistem Informasi Pemerintah Daerah Lingkup Keuangan Daerah		Presentase Implemntasi dan Pemeliharaan SIPD Bidang Keuangan	100%	378.172.610	Pengelolaan Data dan Implementasi Sistem Informasi Pemerintah Daerah Lingkup Keuangan Daerah		Presentase Implemntasi dan Pemeliharaan SIPD Bidang Keuangan	100%	378.172.610	
82	Implementasi dan Pemeliharaan Sistem Informasi Pemerintah Daerah Lingkup Keuangan Daerah		Jumlah Dokumen Hasil Implementasi dan Pemeliharaan Sistem Informasi Pemerintah	1 dokumen	378.172.610	Implementasi dan Pemeliharaan Sistem Informasi Pemerintah Daerah Lingkup Keuangan Daerah		Jumlah Dokumen Hasil Implementasi dan Pemeliharaan Sistem Informasi Pemerintah	1 dokumen	378.172.610	

			Daerah Bidang Keuangan Daerah					Daerah Bidang Keuangan Daerah			
III	Program Pengelolaan Barang Milik Daerah		Persentase Aset-aset daerah yang terdata	100%	817.400.000	Program Pengelolaan Barang Milik Daerah		Persentase Aset-aset daerah yang terdata	100%	817.400.000	
	Pengelolaan Barang Milik Daerah		Keberhasilan pengelolaan barang milik daerah	100%	865.703.422	Pengelolaan Barang Milik Daerah		Keberhasilan pengelolaan barang milik daerah	100%	865.703.422	
83	Penyusunan Standar Harga		Jumlah Standar Harga yang Disusun	2 dokumen	100.000.000	Penyusunan Standar Harga		Jumlah Standar Harga yang Disusun	2 dokumen	100.000.000	
84	Penyusunan Standar Barang Milik Daerah dan Standar Kebutuhan Barang Milik Daerah		Jumlah Standar Barang Milik Daerah dan Standar Kebutuhan Barang Milik Daerah	2 dokumen	15.000.000	Penyusunan Standar Barang Milik Daerah dan Standar Kebutuhan Barang Milik Daerah		Jumlah Standar Barang Milik Daerah dan Standar Kebutuhan Barang Milik Daerah	2 dokumen	15.000.000	
85	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah		Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah	100%	15.000.000	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah		Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah	100%	15.000.000	
86	Penyusunan Kebijakan Pengelolaan Barang Milik Daerah		Jumlah Kebijakan Pengelolaan Barang Milik Daerah	5 dokumen	40.000.000	Penyusunan Kebijakan Pengelolaan Barang Milik Daerah		Jumlah Kebijakan Pengelolaan Barang Milik Daerah	5 dokumen	40.000.000	
87	Penatausahaan Barang Milik Daerah		Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah	2 dokumen	60.000.000	Penatausahaan Barang Milik Daerah		Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah	2 dokumen	60.000.000	

88	Inventarisasi Barang Milik Daerah		Jumlah Laporan Hasil Inventarisasi (LHI) Barang Milik Daerah	1 dokumen	20.000.000	Inventarisasi Barang Milik Daerah		Jumlah Laporan Hasil Inventarisasi (LHI) Barang Milik Daerah	1 dokumen	20.000.000	
89	Pengamanan Barang Milik Daerah		Jumlah Laporan Hasil Pengamanan Barang Milik Daerah	1 dokumen	350.703.422	Pengamanan Barang Milik Daerah		Jumlah Laporan Hasil Pengamanan Barang Milik Daerah	1 dokumen	350.703.422	
90	Penilaian Barang Milik Daerah		Jumlah Laporan Hasil Penilaian Barang Milik Daerah dan Hasil Koordinasi Penilaian Barang Milik Daerah	1 dokumen	30.000.000	Penilaian Barang Milik Daerah		Jumlah Laporan Hasil Penilaian Barang Milik Daerah dan Hasil Koordinasi Penilaian Barang Milik Daerah	1 dokumen	30.000.000	
91	Pengawasan dan Pengendalian Pengelolaan Barang Milik Daerah		Jumlah Laporan Hasil Pengawasan dan Pengendalian Pengelolaan Barang Milik Daerah	2 dokumen	20.000.000	Pengawasan dan Pengendalian Pengelolaan Barang Milik Daerah		Jumlah Laporan Hasil Pengawasan dan Pengendalian Pengelolaan Barang Milik Daerah	2 dokumen	20.000.000	
92	Optimalisasi Penggunaan, Pemanfaatan, Pemindahtanganan, Pemusnahan dan Penghapusan Barang Milik Daerah		Jumlah Dokumen Hasil Optimalisasi Penggunaan, Pemanfaatan, Pemindahtanganan, Pemusnahan, dan Penghapusan Barang Milik Daerah	4 dokumen	120.000.000	Optimalisasi Penggunaan, Pemanfaatan, Pemindahtanganan, Pemusnahan dan Penghapusan Barang Milik Daerah		Jumlah Dokumen Hasil Optimalisasi Penggunaan, Pemanfaatan, Pemindahtanganan, Pemusnahan dan Penghapusan Barang Milik Daerah	4 dokumen	120.000.000	

93	Rekonsiliasi dalam rangka Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah		Jumlah Laporan Hasil Rekonsiliasi dalam rangka Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah	2 kegiatan	50.000.000	Rekonsiliasi dalam rangka Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah		Jumlah Laporan Hasil Rekonsiliasi dalam rangka Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah	2 kegiatan	50.000.000	
94	Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah		Jumlah Laporan Barang Milik Daerah yang Disusun	1 dokumen	25.000.000	Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah		Jumlah Laporan Barang Milik Daerah yang Disusun	1 dokumen	25.000.000	
95	Pembinaan Pengelolaan Barang Milik Daerah		Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Pengelolaan Barang Milik Daerah Pemerintah Kabupaten/Kota	1 dokumen	20.000.000	Pembinaan Pengelolaan Barang Milik Daerah		Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Pengelolaan Barang Milik Daerah Pemerintah Kabupaten/Kota	1 dokumen	20.000.000	
IV	Program Pengelolaan Pendapatan Daerah		Persentase Penerimaan Pendapatan Asli Daerah (PAD) terhadap target	100%	1.556.676.315	Program Pengelolaan Pendapatan Daerah		Persentase Penerimaan Pendapata Asli Daerah(PAD) terhadap target	100%	1.556.676.315	
	Pengelolaan Pendapatan Daerah		Persentase Peningkatan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah		1.556.676.315	Pengelolaan Pendapatan Daerah		Persentase Peningkatan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah		1.556.676.315	
96	Perencanaan Pengelolaan Pajak Daerah		Jumlah Dokumen Rencana Pengelolaan Pajak Daerah	1 dokumen	103.376.315	Perencanaan Pengelolaan Pajak Daerah		Jumlah Dokumen Rencana Pengelolaan Pajak Daerah	1 dokumen	103.376.315	

97	Analisa dan Pengembangan Pajak Daerah, serta Penyusunan Kebijakan Pajak Daerah		Jumlah Dokumen Hasil Analis Pajak Daerah serta Pengembangan Pajak Daerah dan Kebijakan Pajak Daerah	2 dokumen	80.000.000	Analisa dan Pengembangan Pajak Daerah, serta Penyusunan Kebijakan Pajak Daerah		Jumlah Dokumen Hasil Analis Pajak Daerah serta Pengembangan Pajak Daerah dan Kebijakan Pajak Daerah	2 dokumen	80.000.000	
98	Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Pajak Daerah		Jumlah Laporan Pelaksanaan Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Pajak Daerah	1 dokumen	150.000.000	Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Pajak Daerah		Jumlah Laporan Pelaksanaan Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Pajak Daerah	1 dokumen	150.000.000	
99	Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengelolaan Pajak Daerah		Jumlah Sarana dan Prasarana Pengelolaan Pajak Daerah	100%	150.000.000	Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengelolaan Pajak Daerah		Jumlah Sarana dan Prasarana Pengelolaan Pajak Daerah	100%	150.000.000	
100	Pendataan dan Pendaftaran Objek Pajak Daerah		Jumlah Laporan Hasil Pendataan dan Pendaftaran Objek Pajak Daerah, Subjek Pajak dan Wajib Pajak Daerah	1 dokumen	60.000.000	Pendataan dan Pendaftaran Objek Pajak Daerah		Jumlah Laporan Hasil Pendataan dan Pendaftaran Objek Pajak Daerah, Subjek Pajak dan Wajib Pajak Daerah	1 dokumen	60.000.000	

101	Pengolahan, Pemeliharaan dan Pelaporan Basis Data Pajak Daerah		Jumlah Laporan Hasil Pengolahan, Pemeliharaan, dan Pelaporan Basis Data Pajak Daerah	1 dokumen	130.000.000	Pengolahan, Pemeliharaan dan Pelaporan Basis Data Pajak Daerah		Jumlah Laporan Hasil Pengolahan, Pemeliharaan, dan Pelaporan Basis Data Pajak Daerah	1 dokumen	130.000.000	
102	Penilaian Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBBP2) serta Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB)		Jumlah Objek Pajak yang Disesuaikan NJOP nya	1 dokumen	100.000.000	Penilaian Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBBP2) serta Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB)		Jumlah Objek Pajak yang Disesuaikan NJOP nya	1 dokumen	100.000.000	
103	Penetapan Wajib Pajak Daerah		Jumlah Dokumen Ketetapan Pajak Daerah	1 dokumen	150.000.000	Penetapan Wajib Pajak Daerah		Jumlah Dokumen Ketetapan Pajak Daerah	1 dokumen	150.000.000	
104	Pelayanan dan Konsultasi Pajak Daerah		Jumlah Layanan dan Konsultasi Pajak Daerah	1 dokumen	150.000.000	Pelayanan dan Konsultasi Pajak Daerah		Jumlah Layanan dan Konsultasi Pajak Daerah	1 dokumen	150.000.000	

105	Penelitian dan Verifikasi Data Pelaporan Pajak Daerah		Jumlah Data Pelaporan Pajak Daerah yang Telah Dilakukan Penelitian dan Verifikasi	1 dokumen	200.000.000	Penelitian dan Verifikasi Data Pelaporan Pajak Daerah		Jumlah Data Pelaporan Pajak Daerah yang Telah Dilakukan Penelitian dan Verifikasi	1 dokumen	200.000.000	
106	Penagihan Pajak Daerah		Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Penagihan Pajak Daerah	1 dokumen	100.000.000	Penagihan Pajak Daerah		Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Penagihan Pajak Daerah	1 dokumen	100.000.000	
107	Penyelesaian Keberatan Pajak Daerah		Jumlah Dokumen Hasil Penyelesaian Keberatan Pajak Daerah	1 dokumen	30.000.000	Penyelesaian Keberatan Pajak Daerah		Jumlah Dokumen Hasil Penyelesaian Keberatan Pajak Daerah	1 dokumen	30.000.000	
108	Pengendalian, Pemeriksaan dan Pengawasan Pajak Daerah		Jumlah Dokumen Hasil Pemeriksaan serta Pengendalian dan Pengawasan Pajak Daerah	1 dokumen	100.000.000	Pengendalian, Pemeriksaan dan Pengawasan Pajak Daerah		Jumlah Dokumen Hasil Pemeriksaan serta Pengendalian dan Pengawasan Pajak Daerah	1 dokumen	100.000.000	

109	Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Retribusi Daerah		Jumlah Laporan Hasil Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Retribusi Daerah	1 dokumen	50.300.000	Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Retribusi Daerah		Jumlah Laporan Hasil Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Retribusi Daerah	1 dokumen	50.300.000	
TOTAL PAGU					27.024.514.816						27.024.514.816

II.5 Telaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

Dalam bagian ini diuraikan hasil kajian terhadap Program dan Kegiatan yang diusulkan dari para pemangku kepentingan, baik dari kelompok masyarakat terkait langsung dengan pelayanan perangkat daerah.

Untuk Badan Keuangan Daerah (BKD) Kota Singkawang tidak ada program dan kegiatan yang diusulkan dari para pemangku kepentingan, baik dari kelompok masyarakat terkait langsung dengan pelayanan perangkat daerah. Penelaahan usulan program dan kegiatan Badan Keuangan Daerah Kota Singkawang dapat dilihat pada tabel 2.4 berikut ini:

Tabel 2.4
Usulan Program dan Kegiatan dari
Para Pemangku Kepentingan Tahun 2023
Kota Singkawang

No	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Besaran/ Volume	Catatan
-	-	-	-	-	-

BAB III TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH

III.1 Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional

Pada tahun 2023, Tema pembangunan nasional yang ditetapkan dalam Rancangan RKP tahun 2023 adalah “Peningkatan Sumber Daya Manusia untuk Pertumbuhan Berkualitas” dengan Prioritas Nasional (PN) dan Program Prioritas (PP) yang ditetapkan dalam Rancangan RKP 2023 adalah sebagai berikut:

Tabel 3.1

Prioritas Nasional dan Program Prioritas dalam Rancangan RKP tahun 2023			
Prioritas Nasional		Program Prioritas	
PN 1: Pembangunan Manusia dan Pengentasan Kemiskinan		PP 1:	Perlindungan Sosial dan Tata Kelola Kependudukan
		PP 2:	Peningkatan Akses dan Kualitas Pelayanan Kesehatan
		PP 3:	Pemerataan Layanan Pendidikan Berkualitas
		PP 4:	Pengentasan Kemiskinan
		PP 5:	Pembangunan Budaya, Karakter, dan Prestasi Bangsa
PN 2: Konektivitas dan Pemerataan		PP 1:	Perluasan Infrastruktur Dasar
		PP 2:	Penguatan Infrastruktur Kawasan Tertinggal dan Ketahanan Bencana
		PP 3:	Peningkatan Konektivitas Multimoda dan Antar moda Mendukung Pertumbuhan Ekonomi
		PP 4:	Peningkatan Infrastruktur Perkotaan
		PP 5:	Perluasan Teknologi Informasi dan Komunikasi
PN 3: Nilai Tambah Ekonomi dan Kesempatan Kerja		PP 1:	Penguatan Kewirausahaan dan UMKM

		PP 2:	Peningkatan Nilai Tambah Ekonomi dan Investasi di Sektor Riil
		PP 3:	Peningkatan Produktivitas Tenaga Kerja dan Penciptaan Lapangan Kerja
		PP 4:	Peningkatan Ekspor bernilai tambah tinggi dan penguatan Tingkat Komponen Dalam Negeri (TKDN)
		PP 5:	Penguatan Pilar Pertumbuhan dan Daya Saing Ekonomi
PN 4:	Ketahanan Pangan,Air, Energi dan Lingkungan Hidup	PP 1:	Pemenuhan Kebutuhan Energi melalui peningkatan EBT
		PP 2:	Peningkatan Ketersediaan, Akses dan Kualitas Konsumsi Pangan
		PP 3:	Peningkatan Kuantitas, Kualitas dan Aksesibilitas Air
		PP 4:	Peningkatan Daya dukung SDA dan Daya Tampung Lingkungan
		PP 5:	Penguatan Ketahanan Bencana
PN 5:	Stabilitas Pertahanan dan Keamanan	PP 1:	Penguatan Kemampuan Pertahanan
		PP 2:	Peningkatan Diplomasi Politik dan Kerjasama Pembangunan Internasional
		PP 3:	Penguatan Sistem Peradilan dan Upaya Anti Korupsi
		PP 4:	Penanggulangan Narkotika, Terorisme, dan Peningkatan Kamtibmas
		PP 5:	Peningkatan Keamanan Siber, dan Penguatan Keamanan Laut

III.2 Tujuan dan Sasaran Renja Perangkat Daerah

Salah satu misi yang ditetapkan oleh Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah terpilih adalah **”Mewujudkan Pemerintahan yang Bersih, Tegas, Amanah dan Efektif Yang Berorientasi Pada Pelayanan Publik yang Prima Berbasis Teknologi Komunikasi dan Informasi”**. Dari misi tersebut diatas tujuan yang hendak dicapai lima tahun kedepan adalah **”Terwujudnya tata Kelola Pemerintahan yang baik”**. Maka salah satu sasaran yang hendak dicapai adalah Meningkatkan Akuntabilitas Kinerja dan Keuangan. Badan Keuangan Daerah memiliki tujuan yaitu Meningkatkan akuntabilitas Kinerja dan Keuangan penyelenggaraan Pemerintah Daerah.

Dengan memperhatikan tema dan prioritas pembangunan Kota Singkawang Tahun 2024 tersebut, isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi Badan Keuangan Daerah serta tujuan dan sasaran Renstra Badan Keuangan Daerah Tahun 2023-2026, maka rumusan tujuan dan sasaran Renja Badan Keuangan Daerah tahun 2024 adalah sebagai berikut:

Tabel 3.3
Tujuan dan Sasaran Renja Badan Keuangan Daerah tahun 2024

No	Tujuan	Sasaran	Indikator	Target
1	Meningkatnya akuntabilitas kinerja dan keuangan penyelenggaraan pemerintah daerah	Meningkatnya akuntabilitas keuangan penyelenggaraan pemerintah daerah	Opini BPK terhadap laporan keuangan	WTP
			Persentase penyusunan laporan keuangan OPD sesuai SAP	100 %

BAB IV

RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

Rencana kerja dan pendanaan perangkat daerah berisi rumusan rencana program/kegiatan yang dilaksanakan oleh Badan Keuangan Daerah tahun 2024 disertai dengan indikator kinerja dan pagu indikatifnya. Rumusan rencana program/kegiatan Badan Keuangan Daerah tahun 2024 disajikan pada tabel berikut:

Tabel 4.1
Rumusan Rencana Program/Kegiatan Badan Keuangan Daerah Tahun 2025 dan Prakiraan Maju 2026
Kota Singkawang

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program /Kegiatan/SubKegiatan	Rencana Tahun 2025 (Tahun Rencana)				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026	
			Lokasi	Target capaian kinerja	Kebutuhan Dana/pagu indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
5.02.01.	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Predikat Nilai Sakip		BB	4.938.974.401	APBD		BB	11.582.564.257
5.02.01.2.01.	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase Dokumen Perencanaan dan Evaluasi Kinerja yang disusun	Sekretar iat BKD	100%	45.000.000			100%	45.247.500
5.02.01.2.01.01.	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah		3 Dokumen	10.000.000			3 Dokumen	10.055.000
5.02.01.2.01.02.	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA- SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD		1 Dokumen	5.000.000			1 Dokumen	5.027.500

5.02.01.2.01.03.	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD		1 Dokumen	5.000.000			1 Dokumen	5.027.500
5.02.01.2.01.04.	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD		1 Dokumen	5.000.000			1 Dokumen	5.027.500
5.02.01.2.01.05.	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD		1 Dokumen	5.000.000			1 Dokumen	5.027.500
5.02.01.2.01.06.	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD		2 Laporan	5.000.000			2 Laporan	5.027.500
5.02.01.2.01.07.	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		3 Laporan	10.000.000			3 Laporan	10.055.000
5.02.01.2.02.	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Dokumen Keuangan yang disusun	Sekretariat BKD	100%	9.319.122.982			100%	9.370.464.257

5.02.01.2.02.01.	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN		100%	8.198.569.382			100%	8.243.747.612
5.02.01.2.02.02.	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN		1 dokumen	1.085.553.600			1 dokumen	1.091.524.145
5.02.01.2.02.03.	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD		1 dokumen	10.000.000			1 dokumen	10.055.000
5.02.01.2.02.04.	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	Jumlah Dokumen Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD		1 dokumen	5.000.000			1 dokumen	5.027.500
5.02.01.2.02.05.	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD		1 laporan	5.000.000			1 laporan	5.027.500
5.02.01.2.02.06.	Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan	Jumlah Dokumen Bahan Tanggapan Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Pemeriksaan		2 dokumen	5.000.000			2 dokumen	5.027.500
5.02.01.2.02.07.	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan/Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan/ Semesteran SKPD		2 laporan	5.000.000			2 laporan	5.027.500

5.02.01.2.02.08.	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran		2 dokumen	5.000.000			2 dokumen	5.027.500
5.02.01.2.03.	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Cakupan Adminitrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah yang dilaksanakan	Sekretariat BKD	100%	35.000.000	APBD		100%	35.192.500
5.02.01.2.03.01.	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD		1 dokumen	5.000.000	APBD		1 dokumen	5.027.500
5.02.01.2.03.02.	Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Dokumen Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD		1 dokumen	5.000.000	APBD		1 dokumen	5.027.500
5.02.01.2.03.03.	Koordinasi dan Penilaian Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Laporan Hasil Penilaian Barang Milik Daerah dan Hasil Koordinasi Penilaian Barang Milik Daerah SKPD		1 laporan	5.000.000	APBD		1 laporan	5.027.500
5.02.01.2.03.04.	Pembinaan, Pengawasan dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Hasil Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD		1 laporan	5.000.000	APBD		1 laporan	5.027.500
5.02.01.2.03.05.	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD		1 laporan	5.000.000	APBD		1 laporan	5.027.500

5.02.01.2.03.06.	Penatausahaan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD		1 laporan	5.000.000	APBD		1 laporan	5.027.500
5.02.01.2.03.07.	Pemanfaatan Barang Milik Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Pemanfaatan Barang Milik Daerah SKPD		1 dokumen	5.000.000	APBD		1 dokumen	5.027.500
5.02.01.2.05.	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Cakupan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah yang dilaksanakan		100%	100.000.000	APBD		100%	100.550.000
5.02.01.2.05.01.	Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai	Jumlah Unit Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai		1 unit	5.000.000	APBD		1 unit	5.027.500
5.02.01.2.05.02.	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan		1 paket	70.000.000	APBD		1 paket	70.385.000
5.02.01.2.05.03.	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian		1 dokumen	5.000.000	APBD		1 dokumen	5.027.500
5.02.01.2.05.04.	Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian		1 dokumen	5.000.000	APBD		1 dokumen	5.027.500
5.02.01.2.05.05.	Monitoring, Evaluasi dan Penilaian Kinerja Pegawai	Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai		1 dokumen	5.000.000	APBD		1 dokumen	5.027.500

5.02.01.2.05.09.	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan		10 orang	10.000.000	APBD		10 orang	10.055.000
5.02.01.2.06.	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Cakupan Administrasi Umum yang disediakan		100%	620.000.000	APBD		100%	623.410.000
5.02.01.2.06.01.	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan		1 paket	30.000.000	APBD		1 paket	30.165.000
5.02.01.2.06.02.	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan		1 paket	20.000.000	APBD		1 paket	20.110.000
5.02.01.2.06.03.	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan		1 paket	20.000.000	APBD		1 paket	20.110.000
5.02.01.2.06.04.	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan		1 paket	5.000.000	APBD		1 paket	5.027.500
5.02.01.2.06.05.	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan		1 paket	10.000.000	APBD		1 paket	10.055.000

5.02.01.2.06.06.	Penyediaan Bahan Bacaan dan peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan		1 dokumen	5.000.000	APBD		1 dokumen	5.027.500
5.02.01.2.06.08.	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu		1 laporan	10.000.000	APBD		1 laporan	10.055.000
5.02.01.2.06.09.	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD		1 laporan	500.000.000	APBD		1 laporan	502.750.000
5.02.01.2.06.10.	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD		1 dokumen	10.000.000	APBD		1 dokumen	10.055.000
5.02.01.2.06.11.	Dukungan Pelaksanaan Sistem Informasi Pemerintah Berbasis Elektronik pada SKPD	Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD		1 dokumen	10.000.000	APBD		1 dokumen	10.055.000
5.02.01.2.07.	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Cakupan Pengadaan Barang Milik Daerah yang diadakan		100%	680.000.000	APBD		100%	683.740.000
5.02.01.2.07.01	Pengadaan kendaraan dinas atau kendaraan dinas jabatan	Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan		1 unit	300.000.000	APBD		1 unit	301.650.000
5.02.01.2.07.02.	Pengadaan kendaraan Dinas Operasional atau lapangan	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan		3 unit	70.000.000	APBD		3 unit	70.385.000

5.02.01.2.07.05.	Pengadaan mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan		1 unit	30.000.000	APBD		1 unit	30.165.000
5.02.01.2.07.06.	Pengadaan Peralatan dan Mesin lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan		1 unit	20.000.000	APBD		1 unit	20.110.000
5.02.01.2.07.08.	Pengadaan Aset tak berwujud	Jumlah Unit Aset Tak Berwujud yang Disediakan		1 unit	20.000.000	APBD		1 unit	20.110.000
5.02.01.2.07.09.	Pengadaan Gedung kantor atau bangunan lainnya	Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan		1 unit	80.000.000	APBD		1 unit	80.440.000
5.02.01.2.07.10.	Pengadaan sarana dan prasarana gedung kantor atau bangunan lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan		1 unit	80.000.000	APBD		1 unit	80.440.000
5.02.01.2.07.11.	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan		1 unit	80.000.000	APBD		1 unit	80.440.000
5.02.01.2.08.	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Cakupan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang disediakan	Sekretariat BKD	100%	400.000.000	APBD		100%	402.200.041

5.02.01.2.08.01.	Penyediaan jasa surat menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat		1 laporan	20.000.000			1 laporan	20.110.000
5.02.01.2.08.02.	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan		1 laporan	300.000.000	APBD		1 laporan	301.650.000
5.02.01.2.08.04.	Penyediaan jasa pelayanan Umum kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan		1 laporan	80.000.000	APBD		1 laporan	80.440.000
5.02.01.2.09.	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase SKPD yang telah menyampaikan Pemeliharaan Barang Milik Daerah		100%	320.000.000	APBD		100%	321.760.000
5.02.01.2.09.01.	Penyediaan jasa pemeliharaan, biaya pemeliharaan dan pajak kendaraan perorangan dinas atau kendaraan dinas jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya		1 unit	20.000.000	APBD		1 unit	20.110.000
5.02.01.2.09.02.	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya		1 unit	60.000.000	APBD		1 unit	60.330.000
5.02.01.2.09.05.	Pemeliharaan Mebel	Jumlah Mebel yang Dipelihara		1 unit	60.000.000	APBD		1 unit	60.330.000
5.02.01.2.09.06.	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara		1 unit	60.000.000	APBD		1 unit	60.330.000

5.02.01.2.09.09.	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung kantor dan bangunan lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi		1 unit	60.000.000	APBD		1 unit	60.330.000
5.02.01.2.09.10.	Pemeliharaan/Rehabilitasi sarana dan prasarana gedung kantor atau bangunan lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi		1 unit	60.000.000			1 unit	60.330.000
5.02.02.	Program Pengelolaan Keuangan Daerah	1. Persentase OPD yang menyusun dokumen rencana anggaran tepat waktu; 2. Cakupan Pencapaian penyerapan belanja perangkat daerah sesuai target; 3. Persentase OPD yang telah menyampaikan laporan keuangan tepat waktu		100%	12.167.933.300	APBD		100%	13.155.066.451
5.02.02.2.01.	Koordinasi dan Penyusunan Rencana Anggaran Daerah				1.096.110.321	APBD			1.102.138.928
5.02.02.2.01.01.	Koordinasi dan Penyusunan KUA dan PPAS	Jumlah Dokumen KUA dan PPAS yang Disusun		1 dokumen	120.000.000	APBD		1 dokumen	120.660.000
5.02.02.2.01.02.	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan KUA dan PPAS	Jumlah Dokumen Perubahan KUA dan Perubahan PPAS yang Disusun		1 dokumen	120.000.000	APBD		1 dokumen	120.660.000

5.02.02.2.01.03.	Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi RKA-SKPD	Jumlah RKA-SKPD yang Diverifikasi		1 dokumen	40.000.000	APBD		1 dokumen	40.220.000
5.02.02.2.01.04.	Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Perubahan RKA-SKPD yang Diverifikasi		1 dokumen	40.000.000	APBD		1 dokumen	40.220.000
5.02.02.2.01.05.	Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi DPA-SKPD	Jumlah DPA- SKPD yang Diverifikasi		1 dokumen	20.800.000	APBD		1 dokumen	20.914.400
5.02.02.2.01.06.	Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi Perubahan DPA-SKPD	Jumlah Perubahan DPA-SKPD yang Diverifikasi		1 dokumen	20.800.000	APBD		1 dokumen	20.914.400
5.02.02.2.01.07.	Koordinasi dan Penyusunan Peraturan Daerah tentang APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD	Jumlah Peraturan Daerah tentang APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD		1 dokumen	200.000.000			1 dokumen	201.100.000
5.02.02.2.01.08.	Koordinasi dan Penyusunan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan APBD	Jumlah Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan APBD		1 dokumen	180.600.000			1 dokumen	181.593.300
5.02.02.2.01.09.	Koordinasi dan Penyusunan Regulasi serta Kebijakan Bidang Anggaran	Jumlah Dokumen Regulasi serta Kebijakan Bidang Anggaran		1 dokumen	50.000.000	APBD		1 dokumen	50.275.000
5.02.02.2.01.10.	Koordinasi Perencanaan Anggaran Pendapatan	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi Perencanaan Anggaran Pendapatan		1 dokumen	20.500.000	APBD		1 dokumen	20.612.750

5.02.02.2.01.11.	Koordinasi Perencanaan Anggaran Belanja Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi Perencanaan Anggaran Belanja Daerah		1 dokumen	140.000.000	APBD		1 dokumen	140.770.000
5.02.02.2.01.12.	Koordinasi Perencanaan Anggaran Pembiayaan	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi Perencanaan Anggaran Pembiayaan		1 dokumen	143.410.321	APBD		1 dokumen	144.199.078
5.02.02.2.02.	Koordinasi dan Pengelolaan Perbendaharaan Daerah	Persentase OPD yang menyusun dokumen rencana anggaran tepat waktu		100 %	321.600.000	APBD		100 %	323.368.800
5.02.02.2.02.01.	Koordinasi dan Pengelolaan Kas Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pengelolaan Kas Daerah		1 dokumen	40.300.000	APBD		1 dokumen	40.521.650
5.02.02.2.02.03.	Penyiapan, Pelaksanaan Pengendalian dan Penerbitan Anggaran Kas dan SPD	Jumlah Dokumen Hasil Pengendalian dan Penerbitan Anggaran Kas dan SPD		4 dokumen	20.400.000	APBD		4 dokumen	20.512.200
5.02.02.2.02.05.	Koordinasi, Fasilitasi, Asistensi, Sinkronisasi, Supervisi, Monitoring dan Evaluasi Pengelolaan Dana Perimbangan dan Dana Transfer lainnya	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Fasilitasi, Asistensi, Sinkronisasi, Supervisi, Monitoring, dan Evaluasi Pengelolaan Dana Perimbangan dan Dana Transfer Lainnya		1 dokumen	170.000.000	APBD		1 dokumen	170.935.000

5.02.02.2.02.07.	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Realisasi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah, Laporan Aliran Kas dan Pelaksanaan Pemungutan/Pemotongan dan Penyetoran Perhitungan Fihak Ketiga(PFK)	Jumlah Laporan Realisasi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah, Laporan Aliran Kas, dan Pelaksanaan Pemungutan/Pemotongan dan Penyetoran Perhitungan Fihak Ketiga (PFK) dan Laporan Hasil Koordinasi dalam rangka Penyusunan Laporan Realisasi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah, Laporan Aliran Kas, dan Pelaksanaan Pemungutan/Pemotongan dan Penyetoran Perhitungan Fihak Ketiga (PFK)		12 Laporan	5.000.000	APBD		12 Laporan	5.027.500
5.02.02.2.02.09.	Rekonsiliasi Data Penerimaan dan Pengeluaran kas serta Pemungutan dan Pemotongan Atas SP2D dengan Instansi terkait	Jumlah Dokumen Hasil Rekonsiliasi Data Penerimaan dan Pengeluaran Kas serta Pemungutan dan Pemotongan atas SP2D dengan Instansi Terkait		1 dokumen	40.700.000	APBD		1 dokumen	40.923.850
5.02.02.2.02.10.	Penyusunan Petunjuk Teknis Administrasi Keuangan yang berkaitan dengan Penerimaan dan Pengeluaran Kas serta Penatausahaan dan Pertanggungjawaban Sub Kegiatan	Jumlah Petunjuk Teknis Administrasi Keuangan yang Berkaitan dengan Penerimaan dan Pengeluaran Kas serta Penatausahaan dan Pertanggungjawaban Sub Kegiatan		1 dokumen	45.200.000	APBD		1 dokumen	45.448.600

5.02.02.2.03.	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Daerah	Persentase OPD yang telah menyampaikan Laporan Keuangan tepat waktu	Bidang Akuntansi dan Pelaporan	100%	318.900.000	APBD		100%	320.653.950
5.02.02.2.03.02.	Rekonsiliasi dan Verifikasi Aset, Kewajiban, Ekuitas, Pendapatan, Belanja, Pembiayaan, Pendapatan-LO dan Beban	Jumlah Dokumen Hasil Rekonsiliasi dan Verifikasi Aset, Kewajiban, Ekuitas, Pendapatan, Belanja, Pembiayaan, Pendapatan-LO, dan Beban		1 dokumen	4.200.000			1 dokumen	4.223.100
5.02.02.2.03.03.	Koordinasi Penyusunan Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Bulanan, Triwulan dan Semesteran	Jumlah Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Bulanan, Triwulan dan Semesteran		1 laporan	9.700.000	APBD		1 laporan	9.753.350
5.02.02.2.03.04.	Konsolidasi Laporan Keuangan SKPD, BLUD dan Laporan Keuangan PEMDA	Jumlah Laporan Keuangan SKPD, BLUD dan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah yang Terkonsolidasi		7 Laporan	200.000.000	APBD		7 Laporan	201.100.000
5.02.02.2.03.05.	Koordinasi dan Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Provinsi dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD kabupaten/kota	Jumlah Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota		1 dokumen	60.000.000	APBD		1 dokumen	60.330.000

5.02.02.2.03.08.	Penyusunan Analisis Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD	Jumlah Dokumen Hasil Analisis Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD		2 dokumen	5.000.000	APBD		2 dokumen	5.027.500
5.02.02.2.03.09.	Penyusunan Kebijakan dan Panduan Teknis Operasional Penyelenggaraan Akuntansi Pemerintah Daerah	Jumlah Kebijakan dan Panduan Teknis Operasional Penyelenggaraan Akuntansi Pemerintah Daerah		2 dokumen	10.000.000	APBD		2 dokumen	10.055.000
5.02.02.2.03.11.	Pembinaan Akuntansi, Pelaporan dan Pertanggungjawaban Pemerintah Kabupaten/Kota	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Akuntansi, Pelaporan dan Pertanggungjawaban Pemerintah Kabupaten/Kota		29 orang	30.000.000	APBD		29 orang	30.165.000
5.02.02.2.04	Penunjang Urusan Kewenangan Pengelolaan Keuangan Daerah	Persentase Realisasi belanja tidak terduga		100%	10.968.229.166	APBD		100%	11.028.652.213
5.02.02.2.04.03.	Analisis Perencanaan dan Pelaksanaan Penerimaan Pinjaman Pemerintah Daerah	Jumlah Laporan Hasil Analisis Perencanaan dan Pelaksanaan Penerimaan Pinjaman Pemerintah Daerah		1 laporan	968.229.166	APBD		1 laporan	973.554.426
5.02.02.2.04.09.	Pengelolaan Dana Darurat dan Mendesak	Jumlah Laporan Hasil Pengelolaan Dana Darurat dan Mendesak		1 laporan	10.000.000.000	APBD		1 laporan	10.055.097.787
5.02.02.2.05.	Pengelolaan Data dan Implementasi Sistem Informasi Pemerintah Daerah Lingkup Keuangan Daerah	Persentase tercapainya dukungan Sistem Informasi Keuangan Daerah pada perangkat daerah		1 Dokumen	378.172.610	APBD		1 Dokumen	380.252.559

5.02.02.2.05.02	Implementasi dan Pemeliharaan Sistem Informasi Pemerintah Daerah Bidang Keuangan Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Implementasi dan Pemeliharaan Sistem Informasi Pemerintah Daerah Bidang Keuangan Daerah		1 dokumen	378.172.610	APBD		1 dokumen	380.252.559
5.02.03.	Program Pengelolaan Barang Milik Daerah	Persentase Aset-aset daerah yang terdata		80 %	954.438.023	APBD		80 %	908.988.593
5.02.03.2.01.	Pengelolaan Barang Milik Daerah	Keberhasilan pengelolaan barang milik daerah		7 kegiatan	865.703.422			7 kegiatan	908.988.593
5.02.03.2.01.01.	Penyusunan Standar Harga	Jumlah Standar Harga yang Disusun		2 Dokumen	100.000.000	APBD		2 Dokumen	100.550.000
5.02.03.2.01.02.	Penyusunan Standar Harga Barang Milik Daerah dan Standar Kebutuhan Barang Milik Daerah	Jumlah Standar Barang Milik Daerah dan Standar Kebutuhan Barang Milik Daerah		2 Dokumen	15.000.000	APBD		2 Dokumen	15.082.500
5.02.03.2.01.03.	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah	Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah		2 Dokumen	15.000.000	APBD		2 Dokumen	15.082.500
5.02.03.2.01.04.	Penyusunan Kebijakan Pengelolaan Barang Milik Daerah	Jumlah Kebijakan Pengelolaan Barang Milik Daerah		5 dokumen	40.000.000	APBD		5 dokumen	40.220.000

5.02.03.2.01.05.	Penatausahaan Barang Milik Daerah	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah		2 laporan	60.000.000			2 laporan	60.330.000
5.02.03.2.01.06.	Inventarisasi Barang Milik Daerah	Jumlah Laporan Hasil Inventarisasi (LHI) Barang Milik Daerah		1 laporan	20.000.000	APBD		1 laporan	20.110.000
5.02.03.2.01.07.	Pengamanan Barang Milik Daerah	Jumlah Laporan Hasil Pengamanan Barang Milik Daerah		1 laporan	350.703.422	APBD		1 laporan	352.632.291
5.02.03.2.01.08.	Penilaian Barang Milik Daerah	Jumlah Laporan Hasil Penilaian Barang Milik Daerah dan Hasil Koordinasi Penilaian Barang Milik Daerah		1 laporan	30.000.000	APBD		1 laporan	30.165.000
5.02.03.2.01.09.	Pengawasan dan Pengendalian Pengelolaan Barang Milik Daerah	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan dan Pengendalian Pengelolaan Barang Milik Daerah		2 laporan	20.000.000	APBD		2 laporan	20.110.000
5.02.03.2.01.10.	Optimalisasi Penggunaan, Pemanfaatan, Pemindahtanganan, Pemusnahan dan Penghapusan Barang Milik Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Optimalisasi Penggunaan, Pemanfaatan, Pemindahtanganan, Pemusnahan, dan Penghapusan Barang Milik Daerah		4 dokumen	120.000.000	APBD		4 dokumen	120.660.000

5.02.03.2.01.11.	Rekonsiliasi dalam rangka Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah	Jumlah Laporan Hasil Rekonsiliasi dalam rangka Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah		2 laporan	50.000.000	APBD		2 laporan	50.275.000
5.02.03.2.01.12.	Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah	Jumlah Laporan Barang Milik Daerah yang Disusun		1 laporan	25.000.000	APBD		1 laporan	25.137.500
5.02.03.2.01.13.	Pembinaan Pengelolaan Barang Milik Daerah	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Pengelolaan Barang Milik Daerah Pemerintah Kabupaten/Kota		1 dokumen	20.000.000	APBD		1 dokumen	58.633.802
TOTAL					27.024.514.816				27.211.868.971

BAB IV PENUTUP

Renja Badan Keuangan Daerah tahun 2024 merupakan dokumen perencanaan untuk periode tahun 2024. Renja tahun 2024 ini disusun sesuai dengan tugas dan fungsi Badan Keuangan Daerah Kota Singkawang serta berpedoman pada Rencana Strategis Badan Keuangan Daerah Kota Singkawang tahun 2023-2026 dan mengacu pada dokumen Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kota Singkawang tahun 2024.

Renja tahun 2024 akan menjadi pedoman Badan Keuangan Daerah dalam menyusun Rencana Kegiatan Anggaran tahun 2024. Selain itu, Renja tahun 2024 akan menjadi dasar evaluasi hasil rencana pembangunan tahunan daerah untuk periode tahun 2024. Evaluasi terhadap hasil Renja tahun 2024 dilakukan setiap triwulan dalam tahun berkenaan. Dalam hal hasil evaluasi tersebut ditemukan adanya ketidaksesuaian/penyimpangan, akan dilakukan tindakan perbaikan/penyempurnaan.

Dengan tersusunnya rencana kerja ini, diharapkan dapat memberikan gambaran pelaksanaan kegiatan sehingga perencanaan dan penganggaran yang dibuat dapat berhasil dan berdaya guna serta semua pihak memiliki satu persepsi tentang rencana kerja sehingga pelaksanaan program dan kegiatan yang direncanakan dapat mencapai hasil yang optimal.

Singkawang, Juli 2023

Kepala Badan Keuangan Daerah



WIDATOTO S.S.E., M.T

Pembina Utama Muda

NIP 19690403 199710 1 001